

ABSTRAK

Pemberian Hak guna usaha harus digunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai yang tercantum dalam Pasal 29 UUPA. Namun, dalam pemberian Hak Guna Usaha sering menjadi masalah dimana para pemegang hak guna usaha tidak mempergunakan hak guna usaha yang didapat sesuai dengan peruntukannya. Seperti yang terjadi oleh PT. Ifishdeco sebagai pemegang HGU perkebunan hanya beroperasi sebagai perusahaan perkebunan jambu mete selama dua tahun, setelah itu mereka meninggalkan lahannya hingga terbengkalai tanpa ada konfirmasi kepada pemerintah maupun warga, namun belakangan tanah warga diketahui telah dijadikan sebagai areal pertambangan nikel oleh perusahaan.

Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini, maka melalui tesis ini menghasilkan kesimpulan Hak Guna Usaha yang dikuasai jika tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dapat hapus, dimana dalam ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menyatakan hapusnya Hak Guna Usaha karena ditelantarkan. Maka, jika pemegang hak dalam melaksanakan haknya tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya maka ada sanksi yang diberikan kepada pemegang hak yaitu berupa pencabutan hak atau pembatalan hak.

Upaya yang harus dilakukan PT. Ifishdeco untuk dapat mengelola areal pertambangan tersebut yaitu dengan merubah izin Hak Guna Usaha Perkebunan menjadi Izin Usaha Pertambangan. Dengan cara mengajukan permohonan kepada pemerintah yang berwenang. Dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa hak atas Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus bukan merupakan pemilikan hak atas tanah.

Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Status Hak Guna Usaha yang Pemanfaatannya Tidak Sesuai Dengan Peruntukannya